



PERAN SEKOLAH PARTAI PDI PERJUANGAN DALAM MEMBENTUK KADER POLITIK BERKUALITAS PADA PEMILU 2024

**Najwa Adhwa Ramadhani, Bella Ola Shakira, Alifah Jasmine Kallista Remanu, Rafif
Luqmanul Aziz, Muhammad Rayyan Hylmi, Restu Rahmawati**

Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Sekolah Partai PDI Perjuangan dalam membentuk dan memaksimalkan kader politik yang berkualitas serta siap menjelang Pemilu 2024, penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, berlokasi di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Jakarta Selatan. Data didapatkan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen, serta dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekolah Partai memainkan peran strategis dalam mencetak kader yang kompeten, ideologis, dan profesional melalui sistem kaderisasi tiga tingkat: pratama, madya, dan utama. Kader utama yang disebut kader pelopor diposisikan sebagai simbol loyalitas dan kualitas partai. Badan Pendidikan dan Pelatihan Partai (Badiklat) memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pendidikan yang tidak hanya bersifat teknis dan kognitif, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kerakyatan dan ideologi Bung Karno. Hambatan yang ditemukan mencakup keterbatasan sumber daya dan distribusi pelaksanaan yang belum merata di daerah. Namun, dengan model kaderisasi berbasis gerakan dan kelas, Sekolah Partai terbukti mampu menghasilkan kader yang siap menghadapi kontestasi politik dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Kata Kunci: Kader Politik, Pemilu 2024, PDI Perjuangan, Sekolah Partai.

PENDAHULUAN

Partai politik berperan sentral dalam sistem demokrasi, terutama dalam hal rekrutmen dan kaderisasi politik. Partai politik memiliki peran vital dalam mempersiapkan pemimpin nasional sehingga masyarakat menuntut untuk dapat memiliki skema yang baik dalam kaderisasi (Nurdiaman dkk, 2019). Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara demokrasi yang terus berkembang memiliki kunci untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, representatif, dan responsif untuk memenuhi kebutuhan rakyat yaitu dengan memilih kader partai yang memiliki kualitas. Pengertian yang lebih mendalam mengenai makna dari kaderisasi yang merupakan sebuah dorongan yang dilakukan partai politik untuk mengasah kemampuan juga integritas para kader sehingga diharapkan dapat menjadi pemimpin yang baik dan berkualitas di masa depan (Nurdiaman dkk, 2019). Pola kaderisasi dan rekrutmen ini masih cenderung menerapkan gaya tradisional di mana proses ini dianggap rahasia dan tidak diperlukan untuk diinformasikan kepada publik. Namun, partai politik juga kerap mengalami tantangan dalam proses kaderisasi. Dalam hal ini, masih banyak ditemukan sistem kaderisasi yang masih abu-abu sehingga masyarakat mengira rekrutmen politik yang dilakukan bersifat oligarkis (Wijayanti & Iswandi, 2021). Oleh karena itu, upaya partai politik dalam membentuk kader yang memiliki kapasitas, integritas, dan loyalitas menjadi sangat penting untuk diperhatikan, karena tidak dapat disanggah bahwa nyawa dari sebuah organisasi adalah bagaimana organisasi itu melakukan sebuah kaderisasi

PDI Perjuangan yang merupakan salah satu partai politik terbesar di Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam penguatan kapasitas kader melalui pendirian

Sekolah Partai (ANTARA News, 2021). Hal yang bisa dijadikan acuan dari pengorganisasian PDI Perjuangan ini yang salah satunya mempunyai sistem rekrutmen dan kaderisasi partai politik yang cenderung baik. Bahkan mereka telah menerbitkan aturan khusus tentang kaderisasi yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Kongres IV di Bali pada tahun 2015 dan Peraturan Partai (PO) PDI Perjuangan No. 9 Tahun 2015, mengenai Kader Partai dan Kaderisasi Partai (Nurdiaman dkk, 2019). Lembaga ini berfungsi sebagai pusat pendidikan politik internal yang bertujuan membentuk kader-kader partai yang tidak hanya memahami ideologi partai dan Pancasila, tetapi juga memiliki kemampuan teknokratis dan strategi politik yang mumpuni (Syaefullah, 2021). Dalam aturan khusus tentang kaderisasi dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), sekolah kaderisasi dalam PDI Perjuangan dibagi menjadi dua, yaitu Sekolah Partai dan Sekolah Kader Partai. Pertama, mereka membagi Sekolah Partai yang merupakan pendidikan yang lebih eksklusif dengan pengelolaan langsung baik dari tingkat pusat dan DPP Partai. Dalam hal ini, yang dapat mengikuti Sekolah Partai adalah seseorang yang nantinya akan maju ke dalam pemilihan umum baik seperti calon menteri; calon anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan sebagainya. Kedua, Sekolah Kader Partai yang merupakan wadah yang disediakan partai untuk memberikan pendidikan yang berkelanjutan sehingga diharapkan dapat membentuk pribadi kader yang memiliki kesamaan ideologi, kesadaran mengenai isu-isu sosial yang ada, dan menanamkan ajaran Bung Karno. Selain itu juga diharapkan dapat mempersiapkan calon pemimpin partai maupun bangsa di masa depan (Nurdiaman dkk, 2019). Sebagai sebuah

perbandingan, beberapa partai lain juga memiliki Sekolah Kader yang bertujuan memberikan pendidikan politik sebagai upaya mempersiapkan kemenangan dalam parlemen. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang merupakan salah satu partai baru, turut juga menggelar sekolah partai bernama Sekolah Kader Solidaritas Indonesia. Dalam persiapan pemilihan legislatif pada tahun 2024, PSI membuka kembali Sekolah Kader Solidaritas Indonesia yang digelar secara dalam jaringan/*Online* (Silaban & Ivanna, 2024). Ini merupakan salah strategi yang dapat dilakukan PSI untuk memenangkan pemilu tahun 2024. Materi yang disampaikan antara kedua partai kurang lebih sama, mengenai pembekalan ideologi partai, pencegahan korupsi, keorganisasian, strategi dalam kemenangan, dan sebagainya. Namun yang menjadi perbedaan dengan Sekolah Partai PDI Perjuangan, sebelum ikut pelaksanaan Sekolah Partai, para kader yang akan maju pada Pemilu harus menandatangani Dasa Sila Partai mulai dari persoalan ideologi hingga permasalahan lingkungan hidup yang harus diutamakan (Hasibuan & Ma'riyah, 2022). Dasa Prasetya yang berisi sepuluh janji harus diterapkan nantinya ketika kader tersebut terpilih dalam Pemilu sehingga dengan adanya penandatanganan Dasa Sila Partai, menunjukkan adanya komitmen penuh dari kader partai untuk melayani rakyat secara sungguh-sungguh.

Kehadiran Sekolah Partai ini menjadi langkah konkret dalam menghadapi tantangan regenerasi politik serta meningkatkan kualitas kader yang akan bersaing dalam pemilu. Dengan PDI Perjuangan mengadakan Sekolah Partai juga perlu diapresiasi. Menurut Dosen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Padjajaran, Firman Manan, menilai dengan diadakannya sekolah kader untuk para calon kepala daerah atau pemimpin nantinya akan memberikan kontribusi yang positif

terhadap calon-calon kepala daerah yang berkualitas (Wellyana & Yudha, 2022). Partai politik ini pun berharap bahwa dengan diadakannya Sekolah Partai untuk para pemimpin tidak sekadar memanfaatkan PDI Perjuangan sebagai kendaraan politik tetapi juga harus dibersamai dengan usaha dan perjuangan yang maksimal karena dalam hal ini, tugas partai politik hanya mendorong kepada kader untuk berpartisipasi dalam kegiatan kaderisasi.

Pemilu 2024 menjadi momen penting bagi partai-partai politik, termasuk PDI Perjuangan, untuk menunjukkan hasil dari proses kaderisasi mereka. Melihat pada sistem kaderisasi tersebut, tentunya hal ini akan berdampak terhadap kualitas kader partai yang diusung pada Pemilu 2024. Dalam hal ini, kaitan kaderisasi dengan kualitas kader yang diusung sangat berkaitan erat sehingga dapat memengaruhi citra dan elektabilitas partai, serta keberhasilan partai dalam mencapai target politik. Partai politik memegang peran penting dalam menjaga sistem demokrasi, di mana kualitas kader partai, yang nantinya akan duduk pada lembaga pemerintahan, menjadi kunci untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan responsif. Kaderisasi menjadi penting karena calon pemimpin bangsa harus memiliki kapabilitas yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, mereka juga harus mempunyai kemampuan dan pengetahuan mengenai isu-isu politik, ekonomi, sosial, dan hukum, serta harus memiliki kemampuan berkomunikasi dan negosiasi yang baik sebagai cerminan pemimpin partai yang mempunyai kapabilitas (Zainur, n.d.).

Dalam hal ini, PDI Perjuangan sebagai salah satu partai terbesar di Indonesia, telah mengambil langkah strategis dengan mendirikan Sekolah Partai yang mempunyai tujuan untuk mendidik kader-kader partai agar tidak hanya memahami ideologi PDI

Perjuangan dan Pancasila, tetapi juga memiliki keterampilan teknokratis dan strategi politik. Implikasi nyata dalam membentuk proses kader yang berkualitas telah diterapkan beberapa tokoh kader PDI Perjuangan yang sudah melaksanakan proses kaderisasi dalam Sekolah Partai. Tri Rismaharini yang sudah membuktikan kualitas terhadap kepemimpinannya selama dua periode di Kota Surabaya, telah merubah tatanan kota yang signifikan khususnya terkait perawatan lingkungan sehingga masyarakat bisa mengimplementasikan perawatan lingkungan yang dapat memperindah Kota Surabaya (ANTARA News, 2022). Selain itu, tokoh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok juga salah satu keberhasilan PDI Perjuangan dalam membentuk kualitas kader yang baik. Dengan pembekalan yang diberikan Sekolah Partai PDI Perjuangan sebelum menjadi Gubernur Jakarta, sekarang hal tersebut memberikan dorongan kepada dirinya untuk mengajar anggota dan kader PDI Perjuangan di seluruh pelosok Indonesia, bagaimana menjadi pemimpin yang berani menghadapi resiko, dan sebagainya sehingga akan membentuk kader yang berkualitas dan siap untuk bertarung dalam pemilihan umum (ANTARA News, 2022). Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut dengan penelitian ini yang membahas peran Sekolah Partai PDI Perjuangan dalam membentuk kader politik berkualitas pada Pemilu 2024 dan melihat bagaimana hambatan dan tantangan yang dihadapi untuk membentuk kader politik yang berkualitas dalam Sekolah Partai PDI Perjuangan.

Sebagai pendukung demi kelancaran dan kredibilitas terhadap penelitian yang sedang dilakukan, penelitian ini menggunakan beberapa referensi utama untuk dikaji sebagai tinjauan pustaka. Jurnal penelitian yang berjudul "Analisis Proses Kaderisasi

Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Garut" yang diteliti oleh Miman Nurdiaman, Sartibi Bin Hasyim, R. Ade Gunawan, dan Kalamullah pada tahun 2019 bertujuan menganalisis faktor pendorong dan penghambat proses kaderisasi PDI Perjuangan Kabupaten Garut sehingga dapat disimpulkan keberhasilan dari kaderisasi tersebut. Hasil penelitian menemukan masih ada faktor penghambat pelaksanaan kaderisasi di lapangan yaitu keterbatasan sumberdaya Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis sehingga tidak ada rencana tindak lanjut pasca pelaksanaan kelas kaderisasi untuk membentuk tim monitoring di lapangan. Jurnal penelitian lainnya yang berjudul "Sekolah Kader oleh DPC PDI Perjuangan Bantul", yang diteliti oleh Wellyana dan Romadhona Kusuma Yudha pada tahun 2022 bertujuan menganalisis peran partai politik untuk membentuk sekolah kader agar dapat melaksanakan fungsinya sebagai sosialisasi politik dalam Pilkada serentak beberapa waktu lalu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran PDI Perjuangan dalam sosialisasi politik (sekolah kader) sudah berjalan dengan baik. Terdapat upaya yang dilakukan DPC PDI Perjuangan Bantul dalam membentuk sikap politik dari para kader seperti sekolah kader, sistem kaderisasi, diskusi formal maupun informal. Jurnal lainnya yang menjadi referensi selanjutnya dengan judul "Institusionalisasi Pendidikan Politik PDI Perjuangan Dalam Sekolah Partai Bagi Calon Kepala Daerah 2020" yang dilakukan oleh Shahril Hasibuan dan Chusnul Ma'riyah pada tahun 2022 yang untuk melihat bagaimana PDI Perjuangan dalam Sekolah Partai merancang strategi untuk mempersiapkan pemimpin politik mereka untuk menjadi kepala daerah

melalui Pilkada serentak tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekolah Partai PDI Perjuangan menjadi program strategis partai untuk mempersiapkan kepemimpinan politik kader secara berjenjang dan konsisten melalui pengkaderan dan kaderisasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah berfokus untuk membahas bagaimana PDI Perjuangan melalui sekolah partainya untuk membentuk kader yang mempunyai kualitas. Selain itu, penelitian kami juga menganalisis bagaimana hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh PDI Perjuangan dalam pelaksanaan sekolah partai.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada teori pendidikan politik oleh Kartono tahun 1996. Menurut Kartono, pendidikan politik adalah suatu proses yang dirancang untuk membentuk individu agar memiliki kesadaran politik, memahami sistem politik, serta memiliki kemampuan dan kemauan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik. Tujuan utama dari pendidikan politik adalah menciptakan warga negara yang kritis, bertanggung jawab, dan berdaya dalam menentukan arah kebijakan politik. Kartono membagi pendidikan politik ke dalam tiga dimensi utama, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek kognitif mencakup pemahaman tentang konsep-konsep politik, ideologi, sistem pemerintahan, dan dinamika kekuasaan. Aspek afektif menyangkut sikap, nilai, dan komitmen politik yang terbentuk melalui proses internalisasi nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kebangsaan. Sedangkan aspek psikomotorik merujuk pada keterampilan praktis dalam kegiatan politik keterampilan praktis dalam kegiatan politik, seperti kemampuan berdebat, menyusun strategi kampanye, dan melakukan advokasi kebijakan. Dalam praktiknya, teori pendidikan politik Kartono relevan dengan

implementasi sekolah partai yang diselenggarakan PDI Perjuangan. Melalui pendidikan politik, kader tidak hanya dibekali pengetahuan ideologis seperti ajaran Soekarno atau Marhaenisme, tetapi juga keterampilan teknis dan kepemimpinan untuk terlibat secara aktif dalam sistem politik. Dalam mengadopsi pendekatan pendidikan politik yang menyeluruh, partai dapat menghasilkan kader yang tidak hanya cakap secara teoritis, tetapi juga siap menghadapi tantangan praktik politik di lapangan. Dengan menggunakan teori pendidikan politik Kartono (1996) sebagai kerangka analisis, penelitian ini akan melihat sejauh mana sekolah partai PDI Perjuangan mampu membentuk kader politik yang berkualitas dan kompeten dalam menghadapi Pemilu 2024.

apahh bolee bell makasi yaa AMAN ajahh

naw, gajadii ak masukin metode ya, iyhh maaf ya td malah ngedittHindari sub-sub di dalam pendahuluan. Pendahuluan hendaknya mengandung latar belakang masalah, permasalahan dan tujuan penelitian. Persentase panjang halaman pendahuluan antara 10-15% dari panjang keseluruhan sebuah manuskrip. Rujukan ditunjukkan dengan menuliskan nama keluarga/nama belakang penulis dan tahun terbitan, tanpa nomor halaman.

Landasan teori ditampilkan dalam kalimat-kalimat lengkap, ringkas, serta benar-benar relevan dengan tujuan penulisan artikel ilmiah. Manuskrip ditulis dengan kerapatan baris 1,5 spasi, huruf Cambria 12.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan suatu metodologi yang menyediakan instrumen dengan tujuan untuk dapat memahami makna secara mendalam terkait dengan

fenomena kompleks serta proses yang terjadi di dalam kehidupan sosial secara praktis (Denzin dan Lincon, 2011 di dalam Agustini, dkk., 2023). Dalam penelitian ini, peneliti memilih pendekatan kualitatif karena dianggap sesuai untuk dapat mengkaji dan menganalisis secara lebih mendalam terkait dengan peran Sekolah Partai PDI Perjuangan dalam prosesnya untuk membentuk kader politik yang memiliki kualitas. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti memiliki peluang untuk dapat menggali pemahaman subjektif dari para kader, pengurus partai, ataupun para pengamat politik terkait dengan mekanisme Sekolah Partai, nilai-nilai yang diberikan dan ditanamkan, serta sejauh mana program ini berdampak terhadap peningkatan kualitas kader partai politik. Tak hanya itu saja, dengan pendekatan kualitatif peneliti memiliki ruang yang lebih fleksibel dalam proses pengumpulan data dalam penelitian politik, di mana dalam hal ini tentunya dinamika dan konteks sosial mengalami perubahan pesat.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan eksplorasi dari suatu kasus melalui data yang mendalam dari waktu ke waktu dengan melibatkan sumber informasi yang beragam dan mendalam. Artinya, jenis penelitian menggunakan studi kasus di mana peneliti harus mencari informasi lebih mendalam mengenai fenomena yang diambil serta mengumpulkan berbagai informasi untuk memperoleh data selama beberapa waktu tertentu (John W. Creswell, 1998 di dalam Assyakurrohim, dkk., 2023). Dalam hal ini, jenis studi kasus digunakan oleh peneliti, karena dalam pengerjaannya penelitian ini berfokus pada satu fenomena spesifik, yaitu penyelenggaraan Sekolah Partai yang diadakan oleh PDI Perjuangan guna

menciptakan kader partai politik yang berkualitas menjelang pemilu 2024.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan yang berlokasi di Jl. Lenteng Agung Raya No.99, RT.5/RW.1, Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12610. Pada penelitian ini, peneliti telah merencanakan untuk melaksanakan penelitian yang dilaksanakan pada bulan April 2025 hingga Juni 2025 yang mencakup tahapan persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penyajian data hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh sumber data dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber langsung, dimana narasumber yang telah ditentukan dalam penelitian secara langsung memberikan data ke peneliti (Sugiyono, 2016 di dalam Alir, 2005), sedangkan data sekunder merupakan pengolahan data dari sumber primer oleh pihak pengumpul data dari pihak lain (Husen Umar, 2013 di dalam Alir, 2005). Pada penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara secara mendalam dengan para pihak PDI Perjuangan yang terlibat dalam penyelenggaraan Sekolah Partai. Penggunaan data primer dalam penelitian ini berfungsi untuk dapat menggali topik penelitian secara mendalam, terlebih lagi penelitian ini merupakan penelitian kontemporer yang juga membutuhkan data dan penjelasan terbaru terkait topik penelitian yang dipilih. Sedangkan data sekunder didapatkan dari dokumen-dokumen digital, seperti jurnal-jurnal di *google scholar*, dokumen resmi partai, publikasi media, serta hasil kajian yang dinilai relevan dengan topik penelitian ini.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan model interaktif

dari Miles dan Huberman. Miles dan Huberman memaparkan bahwa terdapat 3 model interaktif dalam analisis data yang diantaranya adalah (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan. Dalam hal ini, ketiga teknik analisis menurut Miles dan Huberman akan selalu ada pada setiap penelitian kualitatif karena akan selalu ada hubungan diantara ketiga komponen tersebut agar data yang dihasilkan dapat diverifikasi sehingga akan menentukan arah isi kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian (Zulfirman, 2022). Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan dan mengelompokkan sesuai tema yang berkaitan dengan pembentukan kader politik berkualitas. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks tematik untuk memudahkan pemahaman. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan interpretasi terhadap temuan-temuan yang telah dianalisis secara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekolah Partai PDI Perjuangan

Untuk menciptakan calon kader atau kader yang berkualitas, sejumlah partai di Indonesia mendirikan sekolah partai dengan tujuan untuk membina dan mengasah kemampuan berpolitik para calon kader atau kader mereka. Salah satu partai politik yang mendirikan sekolah partai adalah PDI Perjuangan. Didirikannya sekolah kader bertujuan untuk membekali para kader terkait dengan pemahaman ideologi Pancasila, regulasi hukum, kebijakan publik, program kerja, dan juga pedoman dalam berperilaku sebagai warga negara. Dalam hal ini, PDI Perjuangan merupakan partai politik yang secara konsisten memberikan fasilitas berupa sekolah partai kepada kadernya. Angkatan pertama sekolah partai PDI Perjuangan digelar pertama kali di Yogyakarta, lebih tepatnya di Gedung

Jogja Expo Center pada Kamis 23 Februari tahun 2012 silam. Sekolah partai yang diadakan oleh PDI Perjuangan dianggap oleh Megawati Soekarnoputri sebagai langkah awal dengan efek jangka panjang untuk PDI Perjuangan guna menghasilkan kader yang berkualitas secara moril dan tindakan, karena menurutnya kader merupakan elemen penting guna menjaga keberlangsungan partai (Nurita, 2023).

Dalam melakukan proses perekrutan anggotanya, partai PDI Perjuangan melakukan dua cara, yaitu melalui inisiatif pribadi dan juga penawaran melalui tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dan keuntungan untuk partai. Pada konteks rekrutmen yang dilakukan melalui inisiatif individu, masyarakat akan datang secara sukarela ke kantor PDI Perjuangan dan mendaftarkan diri mereka untuk menjadi bagian dari anggota baru. Disisi lain, terdapat juga individu yang masuk menjadi bagian dari PDI Perjuangan karena relasi dari kerabat, saudara, bahkan masyarakat yang berada dekat di lingkungan mereka tinggal. Selain itu, untuk memperbesar cakupan wilayah kekuasaan mereka, PDI Perjuangan melakukan penawaran kepada tokoh masyarakat yang berpengaruh agar mereka bergabung menjadi bagian dari anggota PDI Perjuangan. Rekrutmen melalui cara ini dinilai terbukti efektif, karena tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh akan masuk ke dalam struktural masyarakat yang juga mempermudah distribusi ideologi, tujuan, dan juga regulasi ke masyarakat. Selain itu, model rekrutmen ini telah terbukti memberikan pengaruh untuk dapat menarik simpati masyarakat karena penanaman ideologi yang dilakukan bersifat kuat dan mengakar yang terbangun dari struktur paling bawah. Selanjutnya, setelah melakukan tahapan rekrutmen anggota, partai politik akan menerjunkan anggota baru

mereka untuk turun ke masyarakat agar dapat dilihat kemampuan mereka melalui nilai yang diberikan pada setiap kegiatan yang diikuti oleh mereka. Setelah proses penilaian selesai dilakukan, para anggota partai diberikan pendidikan khusus oleh PDI Perjuangan secara berjenjang (Panantang, dkk, 2014). Dalam wawancara bersama Pak Djarot selaku Ketua DPP PDI Perjuangan, ia menjelaskan terkait dengan keanggotaan di dalam partai serta relevansinya dengan tingkatan pada sekolah partai politik. Menurut penjelasannya, keanggotaan partai politik terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu tahapan pertama dimulai dari status mereka sebagai anggota biasa. Pada tahap ini, keanggotaan mereka diakui karena mereka memiliki tingkat simpati yang tinggi terhadap perjuangan partai dan menunjukkan ketertarikan terhadap partai dengan melakukan kampanye kepada masyarakat lainnya. Kemudian, anggota biasa dapat naik tingkat menjadi kader setelah melewati proses sebagai simpatisan dan memiliki keterlibatan yang lebih aktif dari sebelumnya. Selanjutnya, anggota akan diberikan kartu tanda anggota dan diberikan tugas untuk mengikuti pendidikan kaderisasi yang terdiri dari tiga jenjang, yaitu kaderisasi tingkat pertama, kaderisasi tingkat madya, dan kaderisasi tingkat utama.

Kaderisasi tingkat pertama, pada tingkat ini anggota cenderung dititikberatkan terhadap internalisasi ideologi, visi, dan misi yang dimiliki oleh partai politik. Pada tingkat ini, kaderisasi dilakukan dengan tujuan untuk dapat membangun budaya dan juga menguatkan konsolidasi internal partai politik kepada para kader. Selain itu, pada tahap ini, partai politik memiliki tujuan untuk memberikan keterampilan baru terkait dengan manajemen dasar dan juga pengelolaan partai. Keterampilan yang diberikan oleh partai

politik kepada anggota meliputi aspek teknis seperti menentukan jadwal rapat, merancang suatu program, melakukan implementasi program, mengatur jalannya kampanye, melakukan pengumpulan dana, dan aspek lainnya yang menyangkut dengan pengaturan internal partai. Kaderisasi tingkat madya, pada tingkat ini partai politik memiliki tujuan untuk dapat memberikan pelatihan terhadap kader partai yang memiliki kemampuan untuk menjadi pengurus partai pada tingkat provinsi, menjadi anggota DPRD provinsi atau bahkan menjadi kepala daerah pada tingkat provinsi. Pada tingkat ini, partai politik memberikan pelatihan kepada kader berupa strategi pemenangan pemilu, kemampuan dalam komunikasi politik, *leadership*, keterampilan komunikasi interpersonal dengan tujuan untuk menggerakkan massa, representasi politik, kemampuan untuk melakukan penyelesaian masalah, membuat suatu kebijakan, dan juga pelatihan untuk membuat strategi kampanye. Pada tingkat ini, materi dan kurikulum yang diberikan lebih rinci dibanding dengan tingkat sebelumnya dengan fokus utama untuk mempersiapkan para kader agar mendapatkan kemenangan pada pemilu dan juga mendapatkan berbagai posisi penting di tingkat provinsi. Kaderisasi tingkat utama, pada tingkat ini partai politik berfokus untuk mempersiapkan para pengurus partai tingkat pusat, anggota legislatif tingkat nasional, dan juga calon presiden serta calon wakil presiden. Pada tahapan ini, selain memberikan kesadaran terkait dengan nilai-nilai partai, para kader juga diberikan pemahaman terkait dengan regulasi dan strategi pemenangan pemilu. Tidak hanya itu saja, para kader juga diberikan persiapan secara lengkap melalui pengetahuan manajerial yang berkaitan dengan isu-isu nasional dan juga internasional, situasi strategis global, dan juga pemahaman terkait

dengan ekonomi, hukum, pemerintahan, serta hubungan internasional (Aulia, 2024).

Kader yang telah menyelesaikan kaderisasi tingkat utama disebut sebagai kader pelopor, yaitu kader yang dinilai telah teruji, terbukti, dan mumpuni dalam menjalankan tugas-tugas partai. Kader pelopor terdiri dari anggota yang berpengalaman, terbukti, dan mampu melaksanakan berbagai tugas strategis partai. Mereka bukan sekadar anggota biasa, tetapi dianggap sebagai ujung tombak partai untuk menjalankan visi, misi, dan program partai di seluruh negeri, termasuk menghadapi kontestasi politik yang kompleks seperti pemilihan legislatif dan eksekutif tingkat pusat. Kader pelopor harus memiliki tiga ciri utama, menurut gagasan partai pelopor yang digagas oleh Bung Karno dan menjadi landasan ideologis PDI Perjuangan: kesempurnaan ideologi, kedisiplinan organisasi, dan kemampuan untuk menjalankan tugas politik secara militan dan konsisten. Diharapkan kader pelopor ini memiliki kemampuan untuk menggerakkan massa secara ideologis, bukan hanya karena alasan pragmatis. Mereka berfungsi sebagai agen transformasi yang mendorong perubahan sosial-politik sesuai dengan nilai-nilai partai untuk membangun masyarakat baru yang lebih adil dan demokratis. Kader pelopor tidak hanya menguasai ideologi dan disiplin, tetapi mereka juga menerima pengetahuan manajerial yang luas. Kader ini juga harus dapat bertindak sebagai pemimpin yang cerdas dan komunikator yang hebat. Mereka harus dapat secara efektif mewakili keinginan rakyat baik di pemerintahan maupun di parlemen. Proses kaderisasi yang berjenjang dan ketat ini memastikan bahwa hanya kader yang benar-benar kompeten, loyal, dan memiliki integritas tinggi yang dapat mencapai tingkat utama dan menjadi kader pelopor. Dengan demikian, kader pelopor menjadi simbol kualitas dan

profesionalisme partai, sekaligus menjadi motor penggerak utama dalam menjaga soliditas dan daya saing PDI Perjuangan di kancah politik nasional. Mereka juga menjadi teladan bagi kader-kader di tingkat pratama dan madya serta menjadi penjaga ideologi dan nilai-nilai partai agar tetap hidup dan relevan di tengah tantangan zaman (Fachrie, 2023).

Kaderisasi ini tidak hanya bertujuan membentuk pemahaman ideologis dan historis terhadap partai, tetapi juga merupakan syarat untuk mendapatkan penugasan tertentu, seperti maju dalam pemilihan legislatif di tingkat kabupaten/kota. Dalam konteks ini, narasumber menekankan pentingnya pendidikan ideologis yang berlandaskan Pancasila dan semangat perjuangan partai untuk membentuk kader yang disiplin, militan, dan peka terhadap penderitaan rakyat kecil. Kartono menekankan pentingnya pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran politik kader sehingga mereka tidak hanya memahami semangat perjuangan partai dan prinsip Pancasila, tetapi juga dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam sikap dan tindakan mereka. Kader dapat berkembang sesuai dengan tingkat pemahaman dan tanggung jawab mereka dalam partai, karena proses ini dilakukan secara dialogis dan berjenjang. Pendidikan politik juga berfungsi sebagai cara untuk mempersiapkan kader untuk menjalankan tugas politik praktis, seperti berpartisipasi dalam pemilihan legislatif, yang membutuhkan kesiapan ideologis dan keahlian politik. Menurut Kartono, pendidikan politik bertujuan untuk membentuk kader yang tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga memiliki kesadaran sosial dan moral yang tinggi sehingga mereka mampu berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan rakyat kecil dan menjaga integritas partai. Oleh karena itu, Sekolah Partai PDI Perjuangan berperan penting

dalam memastikan regenerasi kader yang berkualitas dan setia terhadap nilai-nilai partai, sekaligus mempertahankan integritas partai melalui pendidikan politik.

Model yang digunakan dalam sekolah partai PDI Perjuangan yang dilakukan dibagi menjadi dua jenis, yaitu model kaderisasi sistem kelas dan juga model kaderisasi sistem gerakan. Dalam hal ini, model kaderisasi kelas dilakukan dengan berupa pemberian materi yang dilakukan oleh partai kepada anggota PDI Perjuangan. Dalam sistem ini, partai politik membagi berdasarkan wilayah struktural partai yang terbagi menjadi tingkat pratama pada tingkat cabang, madya pada tingkat provinsi, dan juga utama pada tingkat nasional. Pemberian materi yang dilakukan pada setiap jenjang memiliki perbedaan secara materi dan juga pelatihan yang diberikan. Untuk dapat membagi dan juga menyusun pemberian materi dan juga pelatihan, terdapat Badan Pendidikan dan Pelatihan Partai yang dibentuk oleh DPP berdasarkan hasil keputusan kongres I PDI Perjuangan dengan fungsi untuk membentuk sistematisasi, metode, jadwal, dan juga materi yang akan dilaksanakan saat kaderisasi berlangsung. Pada setiap jenjangnya, setiap kader akan diberikan pengetahuan terkait dengan ideologi partai dan juga wawasan kebangsaan yang harus mereka kuasai (Panantang, dkk, 2024). Sekolah partai adalah lebih dari sekadar lembaga pelatihan; itu adalah organisasi yang bertujuan untuk menanamkan ideologi, prinsip, dan platform partai secara berkelanjutan kepada anggotanya. Kader partai dibentuk melalui proses pendidikan politik ini. Kader harus memiliki pemahaman yang kuat tentang ideologi dan teori politik partai, serta kualitas moral, kesadaran sosial, dan kemampuan kepemimpinan. Pendidikan politik harus dilakukan secara berjenjang dan

terstruktur agar kader dapat berkembang sesuai dengan tingkat pemahaman dan tanggung jawabnya. Kader membutuhkan dan dapat menggunakan materi yang diberikan pada masing-masing tingkat. Ini mencakup penerapan ideologi Pancasila dan prinsip perjuangan partai serta pemahaman kebangsaan dan rencana politik. Selain itu, pembentukan Badan Pendidikan dan Pelatihan Partai (Badiklat) sebagai lembaga yang mengelola metode, kaderisasi, materi, dan jadwal secara sistematis menunjukkan betapa pentingnya sistematisasi dan profesionalisme dalam pendidikan politik partai. Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa sekolah partai harus menjadi pusat pendidikan yang menghasilkan kader yang baik, setia, dan setia sekaligus mampu melaksanakan fungsi politik praktis dengan baik. Teori sekolah partai, selain aspek ideologis dan kognitif, menekankan pentingnya internalisasi nilai moral-etik seperti kepatuhan pada hukum, anti-korupsi, dan semangat perjuangan rakyat kecil. Pendidikan politik seperti ini akan memperkuat legitimasi partai di mata publik dan menyiapkan kader untuk menjadi pemimpin yang peka sosial dan teknis. Model ini tidak hanya menyiapkan kader untuk memenangkan kontestasi politik, tetapi juga membentuk mereka sebagai agen perubahan sosial yang berlandaskan ideologi partai dan nilai-nilai kebangsaan (Hasibuan & Ma'riyah, 2022).

Peran Sekolah Partai PDI Perjuangan dalam Membentuk Kader Politik Yang Berkualitas

Partai politik mempunyai peranan yang krusial dan penting dalam sebuah sistem demokrasi di sebuah negara. Selain itu, partai politik memiliki peranan untuk menjadi jembatan penghubung yang strategis diantara proses pemerintahan dengan warga

negara. Untuk membentuk sumber daya partai yang berkualitas, setiap partai memiliki sistem pengkaderan juga dengan pola yang berbeda dengan penyesuaian terhadap sistem politik yang dianutnya (Femelia, 2017). Kaderisasi merupakan sebuah usaha dari partai politik untuk membentuk dan mempersiapkan sumber daya manusia untuk mewakili suatu partai tersebut dalam menduduki jabatan politik. Pengkaderan juga berarti merupakan proses yang bertahap dan berulang sesuai dengan tingkatan, capaian, situasi, dan kebutuhan tertentu yang memberikan kemungkinan untuk para kader dapat mengembangkan seluruh potensi dalam diri mereka melalui akal, kemampuan fisik, maupun sosial mereka (Hikam dalam Femelia, 2017). Dalam hal ini, partai PDI Perjuangan mempunyai pola dan cara untuk membentuk kader mereka menjadi sumber daya yang berkualitas melalui Sekolah Kader Partai PDI Perjuangan. Dengan adanya pengkaderan sebuah partai politik, akan menentukan kualitas berpolitik dan mutu dari kader sehingga dapat memenuhi ideal dan standar dalam aspek berpolitik menurut partai politik.

Secara spesifik, peran dan fungsi dari partai politik dapat dibagi menjadi dua hal yang berbeda. Pertama, sebuah partai politik memiliki peran dan fungsi dalam internal organisasi, di mana partai politik memegang peranan penting untuk turut memberikan pembinaan terhadap sosialisasi politik melalui edukasi, pembekalan, kaderisasi, juga memberikan sebuah doktrin ideologi yang dianut partai tersebut kepada kadernya guna mempertahankan ideologi dari partai tersebut (Femelia, 2017). Dalam hal ini, Sekolah Partai PDI Perjuangan patut diberikan apresiasi ditengah kondisi politik saat ini, di mana komitmen ideologi partai politik tergerus. Sekolah Partai PDI Perjuangan menjadi instrumen pengembangan baik bagi kader dan partai politik secara

organis untuk berjenjang dan memberikan arah pola rekrutmen dan penguatan internal kader politik agar dapat selaras dan bersinergi dengan ideologi partai sehingga dapat menciptakan proses demokrasi di dalam internal partai tersebut (Hasibuan & Ma'riyah, 2022). Sekolah partai ini dibentuk untuk dapat menghasilkan sebuah kepemimpinan politik dan membentuk eksekutif juga legislatif suatu daerah sebagai bentuk manajerial kepartaian untuk menghadapi tantangan dari adanya perubahan. Sekolah partai PDI Perjuangan memberikan pembekalan baik bagi para kader partai maupun kader partai yang dipersiapkan untuk maju pada pemilihan sehingga nantinya dapat membentuk sebuah pola koalisi yang dapat menguntungkan partai (Hasibuan & Ma'riyah, 2022). Dalam hal ini, sekolah partai juga menjadi sarana untuk membentuk dan mengembangkan kader sehingga dapat menyumbang sumber daya manusia yang berkualitas dengan melalui program pelatihan juga pendidikan yang komprehensif. Dalam kaitannya dengan sekolah partai, peserta yang mengikuti sekolah partai harus melakukan tanda tangan Dasa Sila Partai sebagai bentuk perjanjian akan selalu mengabdikan pada nilai-nilai yang telah ditentukan. Sekolah Partai PDI Perjuangan menekankan mengenai kesepuluh pokok dengan jumlah sepuluh janji yang berawal dengan ideologi Pancasila hingga hal kecil seperti persoalan lingkungan hidup. Hal ini dapat membuktikan bahwa PDI Perjuangan adalah salah satu partai yang kuat dan solid serta juga termasuk kepada salah satu partai politik yang sudah mengakar secara ideologis dan beradaptasi dalam berbagai periode pemerintahan (Watra, 2023).

Melihat lebih jauh, seharusnya peran partai politik dapat menjadi sebuah agen pencerahan, di mana jika partai politik dapat menjalankan fungsinya dengan konsisten akan

membawa dampak dan perubahan pada kualitas kader partai politik. Pengurus partai politik harus dapat tegas dan menekankan serta dapat bersikap dengan lebih bijaksana untuk pengambilan keputusan partai politik sehingga partai politik tidak akan dianggap sebagai perahu tumpangan para kader yang akan mendapatkan kursi jabatan dan kekuasaan dalam pemerintahan (Femelia, 2017). Maka dari itu, sekolah partai berperan untuk memberikan pendidikan, himbauan, dan ajakan untuk selalu berbuat sesuai dengan ideologi dan menyerukan anti korupsi kepada kader yang ingin maju menjadi pemimpin politik sehingga kader-kader yang dihasilkan merupakan kader yang berkualitas dan bersih dari rencana yang kotor. Selain itu, sekolah partai melalui pendidikan politik yang diberikan dapat memperkuat simpati masyarakat terhadap kader partai yang dihasilkan sehingga juga dapat berpengaruh kepada elektabilitas partai PDI Perjuangan.

Melihat aspek kognitif dalam pendidikan politik menurut Kartono, aspek kognitif yang mencakup mengenai pemahaman mendasar mengenai konsep politik, ideologi partai, dan juga sistem pemerintahan. Dalam aspek kognitif yang memberikan pengetahuan politik kepada para kader partai mengenai konsep-konsep politik sehingga dapat membentuk kesadaran politik yang kritis. Dalam wawancara peneliti dengan Djarot Saiful Hidayat selaku Ketua DPP PDI Perjuangan menjelaskan bahwa untuk mendukung aspek kognitif dalam pendidikan politik, para kader sebelum memasuki sekolah partai PDI Perjuangan akan melewati pre-test dan post-test, di mana tes ini bertujuan untuk mengasah kemampuan dasar dari para kader untuk menjalankan tahapan dalam karir politik mereka. Dengan adanya tes ini, partai berharap bahwa para kader akan menjalankan seluruh tahapan sesuai

dengan ideologi yang dianut tanpa melanggar ketentuan yang ada. Dalam hal ini, pengetahuan dan pemahaman yang mendasar mengenai PDI Perjuangan menjadi sangat penting untuk menjadi landasan bagi kader dalam bertindak di masyarakat kedepannya. Pemahaman ini menjadi sangat penting untuk menyelesaikan segala persoalan yang ada di masyarakat untuk menciptakan sebuah negara yang lebih baik (Istikharah & Asrinaldi, 2022).

Pada aspek afektif dalam teori pendidikan politik menurut Kartono merujuk pada sikap, nilai, dan komitmen politik yang terbentuk melalui proses internalisasi nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kebangsaan. Dalam hal ini, nilai-nilai tersebut dapat disampaikan dan ditanamkan untuk membentuk karakter dan berperilaku kader dalam implementasi kehidupan sehari-hari sebagai individu yang bertanggung jawab (Istikharah & Asrinaldi, 2019). Dalam wawancara peneliti bersama Djarot Saiful Hidayat menjelaskan dalam aspek afektif ini, para kader yang masuk ke dalam sekolah partai, harus bersedia bermalam di sebuah kamar mess, di mana para kader harus tidur bersama pada kasur bertingkat yang terdapat replika alam sejarah. Dalam hal ini, bertujuan untuk menumbuhkan pemikiran dan merasakan penderitaan rakyat kecil sehingga ketika sudah menjadi pejabat publik tidak melupakan seluruh perjuangan yang telah dirasakan melalui sekolah partai dan selalu mengingat bahwa mereka itu berasal dari rakyat kecil. Hal ini merupakan doktrin yang diberikan kepada kader untuk selalu ingat masyarakat kecil. Dengan adanya doktrin tersebut, dapat mempengaruhi sikap, nilai, dan komitmen politik para kader dalam membentuk karakter dalam diri mereka sehingga penanaman ideologi dan doktrin partai dapat diterima kepada seluruh tatanan masyarakat dan tidak

dapat dilepaskan jaringannya dari struktur lapisan yang paling bawah (Panantang dkk, 2014).

Dalam wawancara penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan dan Ma'riyah (2022), Komarudin Watubun yang juga merupakan Kepala Sekolah Partai memberikan penjelasan bahwa Sekolah Partai PDI Perjuangan merupakan upaya pendidikan politik yang dapat dilakukan dengan adaptasi terhadap perkembangan jaman tanpa menghilangkan akar ideologis sebuah partai sebagai sub sistem absolut dalam bernegara, dengan hal khusus pada implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dalam hal ini, esensi dari pendidikan politik yang dihasilkan dari Sekolah Partai ini dapat memberikan upaya panjang untuk menanamkan ideologi yang dianut PDI Perjuangan dan wawasan kebangsaan yang lebih luas kepada para kader untuk menjadi sebuah pemimpin yang menduduki jabatan publik. Dalam hal ini, syarat untuk mengikuti Sekolah Partai PDI Perjuangan adalah para kader yang sudah mendapatkan rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan atau telah ditetapkan KPU sesuai tingkatan untuk diberikan pendidikan lebih lanjut (Hasibuan & Ma'riyah, 2022).

Kedua, peran dan fungsi partai politik secara eksternal, di mana partai politik memberikan wadah bagi masyarakat untuk menerima aspirasi mereka juga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Dalam hal ini, partai politik memiliki tanggung jawab untuk menjadikan situasi yang terjadi di masyarakat menjadi lebih baik. Pengkaderan yang dilakukan PDI Perjuangan melalui Sekolah Partai merupakan cara yang dilakukan untuk memberikan kader terbaik kepada masyarakat sehingga nantinya jika para kader tersebut sudah menduduki jabatan publik, diharapkan dapat memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat dan menindaklanjutinya untuk menjadi

sebuah kebijakan. Dengan adanya Sekolah Partai PDI Perjuangan, juga diharapkan akan membentuk para kader yang tidak memiliki mental korupsi dan berdampak pada kemajuan partai kedepannya (Femelia, 2017).

Dalam teori pendidikan politik oleh Kartono, dijelaskan pula dalam pendidikan politik terdapat beberapa aspek yang menjadi acuan dalam pendidikan politik. Salah satu aspeknya adalah aspek psikomotorik, di mana aspek tersebut menekankan untuk membangun keterampilan atau ruang interaksi bersama dalam politik. Dalam bukunya Kartono (1996) menyebutkan bahwa aspek psikomotorik merujuk pada keterampilan praktis dalam kegiatan politik seperti kemampuan kader dalam berdebat, kemampuan dalam menyusun strategi kampanye, dan melakukan advokasi kebijakan, di mana kader dari partai dituntut untuk berinteraksi secara langsung kepada masyarakat. Merujuk pada pembahasan sekolah partai PDI Perjuangan, aspek ini telah dilakukan PDI Perjuangan dalam membentuk dan menciptakan kader yang berkualitas. Hal tersebut tercantum dalam wawancara peneliti bersama Djarot Saiful Hidayat selaku Ketua DPP PDI Perjuangan yang menjabarkan bahwa sekolah partai PDI Perjuangan menggunakan sistem yang beragam dalam mengasah kemampuan berpikir kritis para kader, yang salah satunya dapat dilakukan dengan seminar yang diisi dengan tokoh-tokoh berpengalaman dari internal PDI Perjuangan itu sendiri untuk memberikan pemahaman terkait ideologi partai, nilai-nilai yang harus digunakan dalam berpolitik hingga implementasi dalam kegiatan politik. Selain itu, narasumber kami juga menambahkan bahwa sekolah partai PDI Perjuangan juga menggunakan sistem *Focus Group Discussion* (FGD), di mana para kader dapat berbagi pengalaman satu dengan lainnya yang bertujuan

menggali lebih mendalam mengenai pengetahuan dan pengalaman antara kader satu dengan lainnya. Dalam hal ini, para kader dapat melakukan *brainstorming* untuk bertukar pengalaman nyata mereka yang sudah pernah terjun ke lapangan.

Aspek psikomotorik dalam pendidikan politik terbagi atas dua keahlian yaitu (1) kecapakan intelektual yakni keahlian berpikir kritis dan (2) keahlian berpartisipasi, di mana dalam pendidikan politik mencakup keahlian berinteraksi, memantau isu publik, dan keahlian dalam mempengaruhi masyarakat terhadap kebijakan publik (Istikhrah & Asrinaldi, 2019). Dalam hal ini, narasumber kami menjelaskan lebih mendalam bahwa dengan adanya FGD ini dapat membantu kader PDI Perjuangan dalam berinteraksi kepada masyarakat, karena dalam FGD tersebut, para kader diuji dalam kemampuan berpikir kritis dan ketangguhan terhadap ideologi. Secara spesifik, narasumber kami mengatakan bahwa adanya FGD tersebut untuk menanamkan sifat dan sikap dari ideologi yang dianut dan pemikiran Soekarno dalam penerapan politik di kehidupan bermasyarakat. Dengan dilakukannya kegiatan ini, sehingga dapat memberikan luaran yang baik dan menciptakan kader yang berkualitas dalam Pemilu 2024 lalu. Dengan adanya FGD ini dapat mengasah kemampuan mengidentifikasi persoalan, menganalisis dan kemampuan melakukan suatu evaluasi terhadap isu publik (Istikhrah & Asrinaldi, 2019).

Hambatan dan Tantangan Sekolah Partai PDI Perjuangan dalam Membentuk Kader Politik yang Berkualitas

Proses kaderisasi politik merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Partai politik, sebagai pilar utama demokrasi, memiliki

tanggung jawab untuk menyiapkan kader-kader yang tidak hanya kompeten dalam hal teknis politik, tetapi juga memiliki pemahaman ideologis yang kuat, komitmen etis, serta orientasi pada kepentingan publik. Dalam konteks ini, PDI Perjuangan melalui Sekolah Partai berupaya membentuk kader politik yang tangguh secara pemikiran dan tindakan, serta siap mengemban tugas di lembaga-lembaga negara maupun di tengah masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan kaderisasi belum berjalan dengan baik. Terdapat berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu tantangan paling krusial dan berkelanjutan yang dihadapi oleh Sekolah Partai PDI Perjuangan adalah menguatnya praktik politik uang atau *money politics* dalam setiap siklus pemilihan umum. Fenomena ini tidak hanya melemahkan moralitas, tetapi juga secara langsung mengganggu proses kaderisasi ideologis yang sedang dibangun oleh partai. Dalam sistem politik yang sarat dengan logika transaksional, Politik uang di Pemilihan umum, nasional maupun lokal, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan politik yang di pemilu, yakni faktor ekonomi, faktor mentalitas masyarakat, faktor penegakan hukum, faktor interaksi peran sosial, faktor pemahaman nilai agama yang mengedepankan integritas, serta faktor pemahaman berdemokrasi (Hamson, 2021). Dalam konteks ini, politik uang bukan hanya sekadar pelanggaran hukum, tetapi telah menjadi budaya politik yang diterima secara diam-diam oleh sebagian besar aktor politik dan pemilih.

Dalam wawancara bersama Djarot Saiful Hidayat, selaku ketua DPP PDI Perjuangan, diungkapkan secara jelas bahwa sistem pemilu yang melahirkan logika transaksional dalam

kontestasi politik. Selain mencederai sistem demokrasi yang sedang dibangun bersusah payah, selanjutnya aktor politik akan terus mendidik rakyat dengan tingkah laku politik yang rusak. Para kandidat cenderung membeli suara rakyat dengan uang, bantuan, atau insentif pragmatis lainnya, yang berujung pada degradasi fungsi representatif partai. "Dengan sistem seperti ini," ujar narasumber, "maka suara rakyat dibeli, bukan diperjuangkan. Setelah menang, mereka tidak lagi merasa berkewajiban melayani rakyat karena merasa telah membayar di depan." Hal ini secara langsung bertentangan dengan nilai-nilai ideologis partai yang menolak eksploitasi rakyat demi kepentingan elektoral jangka pendek. Praktik semacam ini menyebabkan kader yang telah mengikuti proses pendidikan politik secara serius menjadi kalah bersaing dengan kandidat bermodal besar namun tanpa ideologis yang kuat. Dengan kondisi seperti itu, tugas Sekolah Partai menjadi semakin berat, karena harus membentuk kader dalam ekosistem politik yang tidak mendukung nilai-nilai ideologis. Oleh karena itu, penanggulangan politik uang tidak cukup hanya melalui regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga memerlukan penguatan pendidikan politik yang berkelanjutan, revitalisasi budaya politik, dan pembenahan sistem pemilu secara struktural.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Gylang Virgo Panantang dkk (2014) mengenai model rekrutmen dan kaderisasi PDI Perjuangan di kota Kediri, diidentifikasi bahwa kader-kader partai seringkali menemui kesulitan dalam meyakinkan masyarakat untuk bergabung dengan partai karena pemahaman politik yang terbatas dan orientasi yang lebih besar terhadap manfaat praktis. Salah satu kendala dalam proses rekrutmen dan kaderisasi adalah pola pikir masyarakat yang

pragmatis serta sulitnya menyampaikan nilai-nilai ideologi secara persuasif di tengah masyarakat yang lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan ekonomi dasar. Pola pikir masyarakat hanya terfokus pada mencari makan dengan mudah dan mencari nafkah. Situasi ini menyebabkan sulitnya merealisasikan keinginan masyarakat ke dalam program partai secara real, membuat kader yang turun ke lapangan menjadi sulit untuk benar-benar meyakinkan masyarakat untuk mendukung partai. Situasi ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih tertarik pada hal-hal yang bisa langsung dirasakan manfaatnya, seperti bantuan atau program nyata. Karena itu, kader perlu lebih bijak dalam menjelaskan bahwa perjuangan politik juga dapat membawa perubahan nyata bagi kehidupan sehari-hari.

Kendala PDI Perjuangan dalam rekrutmen anggota baru terletak juga pada kemampuan komunikasi para kader dan keterbatasan pemateri handal yang mampu memberikan materi sesuai dengan bidang yang dikuasai. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi keberhasilan pendidikan politik, sebab keterbatasan kapasitas komunikasi kader dapat menyebabkan pesan ideologis tidak tersampaikan dengan baik. Di sisi lain, minimnya pemateri yang kompeten membuat proses kaderisasi kerap tidak efektif dan kurang menggugah semangat kader untuk berproses lebih lanjut. Proses kaderisasi yang berjenjang dan bertingkat serta materi yang padat kadang menimbulkan kebosanan oleh peserta kaderisasi. Kader yang memiliki semangat namun kurang pembekalan strategis akan mengalami stagnasi dalam proses pengembangan diri politiknya. Selain itu, kesibukan para kader di luar kegiatan partai juga terkadang menghambat proses pelaksanaan pendidikan kader. Untuk mengatasi hal tersebut, PDI Perjuangan menerapkan sistem

penilaian berbasis prestasi guna memotivasi kader agar lebih aktif mengikuti pelatihan. Sistem ini memunculkan iklim kompetitif sehat antar kader dalam menunjukkan kinerja dan dedikasi terhadap partai. Di samping itu, partai juga berupaya menghadirkan pemateri yang berkualitas dan berpengalaman, agar materi kaderisasi lebih mudah dipahami dan menarik bagi peserta (Panantang dkk, 2014).

Kaderisasi dalam tubuh PDI Perjuangan menghadapi tantangan struktural dan sistemik yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah akibat dari sistem pemilu proporsional terbuka yang memberi ruang besar pada kompetisi antar individu caleg, bukan antar partai. Sistem ini mendorong pola kaderisasi yang individualistik dan pragmatis. Kandidat lebih mengandalkan kekuatan finansial pribadi daripada kompetensi dan integritas ideologis. Akibatnya, biaya politik menjadi sangat tinggi dan membuka peluang terjadinya praktik money politic, seperti pembelian suara dan suap terhadap penyelenggara pemilu (Hidayaturrahman & Ubaid, 2021).

Kondisi tersebut menyebabkan lemahnya institusionalisasi partai dan pembajakan sistem kaderisasi oleh kelompok elit. Di PDIP sendiri, kecenderungan dominasi dinasti politik memperkuat oligarki dalam tubuh partai, sehingga kaderisasi tidak lagi dilakukan secara meritokratis, melainkan berdasarkan kedekatan kultural dan politik (Ramadhan, 2020). Hal ini menimbulkan kegagalan dalam regenerasi politik secara demokratis dan sehat. Sistem politik seperti ini menjadi akar dari praktik korupsi struktural, di mana sistem politik yang transaksional tidak mampu membentuk karakter kader yang berintegritas. Kader disiapkan bukan untuk menjadi pemimpin yang memperjuangkan

ideologi partai, tetapi lebih sebagai alat politik elektoral semata (Samosir, 2021). Evaluasi terhadap sistem politik secara menyeluruh menjadi hal mendesak, termasuk pembenahan regulasi partai, pola rekrutmen kader, dan sistem pendidikan politik internal.

Pemilu 2024 menjadi refleksi nyata dari krisis ini. Banyak pihak menilai bahwa pemilu kali ini tidak berlangsung dalam kondisi normal. Dugaan pelanggaran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi (MK), tekanan dari elite kekuasaan, serta intimidasi politik menambah buruk wajah demokrasi Indonesia. Kader partai, termasuk PDI Perjuangan, dihadapkan pada situasi di mana mereka harus menentukan posisi politik dalam lanskap demokrasi yang cacat prosedural (Khamdan, 2023). Dalam konteks ini, "lawan" bukan lagi individu atau kelompok tertentu, tetapi sistem yang gagal membentuk demokrasi substansial. Untuk itu, perlu ditekankan bahwa solusi tidak dapat ditemukan hanya dengan mengganti elit partai, tetapi dengan merombak struktur dan budaya politik yang telah korup secara sistemik. Penguatan institusi kaderisasi, afirmasi bagi kelompok marjinal, dan pendidikan politik berbasis nilai demokratis perlu dijadikan agenda utama pembaruan politik PDI Perjuangan dan partai-partai lain ke depan (Vikalista dkk., 2023).

SIMPULAN

Sekolah Partai PDI Perjuangan memainkan peran penting dalam pembentukan kader politik yang kompeten yang siap menghadapi dinamika politik nasional, khususnya dalam pemilu 2024. PDI Perjuangan berhasil mengintegrasikan pendidikan ideologis, pelatihan teknis, dan pembentukan karakter kader secara menyeluruh melalui sistem kaderisasi yang terstruktur dan berjenjang. Sistem kaderisasi tersebut terdiri dari tiga

tingkatan utama, yaitu kaderisasi pratama, madya, dan utama. Kader yang sudah teruji dan berpengalaman disiapkan untuk mengemban tugas politik di tingkat nasional atau di tingkat utama, yang merupakan puncak dari proses kaderisasi. Kader yang telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat utama disebut sebagai kader pelopor, yang merupakan simbol kualitas, loyalitas, dan profesionalisme partai. Kader pelopor dianggap telah teruji dan terbukti mampu menjalankan tugas partai secara optimal, menjadi agen perubahan yang menggerakkan massa secara ideologis, dan berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan bangsa. Badan Pendidikan dan Pelatihan Partai (Badiklat) bertanggung jawab untuk mengelola secara profesional seluruh proses pendidikan kader. Pendidikan kader PDI Perjuangan tidak hanya menekankan aspek kognitif dan teknis, tetapi juga membangun kader yang tegas, setia, dan sensitif terhadap penderitaan rakyat kecil. Ini sesuai dengan tujuan partai sebagai partai pelopor yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan ajaran Bung Karno. Dengan menggunakan model kaderisasi yang menggabungkan sistem gerakan dan kelas, kader tidak hanya dapat memahami ideologi dan teori secara mendalam, tetapi mereka juga dapat menerapkannya di lapangan. Hal ini meningkatkan fungsi partai sebagai organisasi politik yang dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat dan menang dalam kontestasi politik yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, terbukti bahwa Sekolah Partai PDI Perjuangan berhasil menghasilkan kader politik yang unggul, jujur, dan profesional. PDI Perjuangan tidak hanya memiliki kemampuan untuk mempertahankan statusnya sebagai partai pemenang pemilu, tetapi juga memiliki kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam membangun masa depan bangsa melalui

kader-kader yang siap memimpin dan mengabdikan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Alir, D. (2005). Metodologi penelitian. Jakarta: PT Rajawali Press.

ANTARA News. (2021, 29 Juli). Kantor PDI Perjuangan di Lenteng Agung jadi gedung sekolah partai. Diakses pada 8 April 2025, dari <https://www.antaranews.com/berita/2295548/kantor-pdi-perjuangan-di-lenteng-agung-jadi-gedung-sekolah-partai>

ANTARA News. (2022, 7 Januari). PDIP miliki banyak kader berkualitas untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Diakses pada 14 April 2025, dari <https://www.antaranews.com/berita/2630269/PDI-Perjuangan-miliki-banyak-kader-berkualitas-untuk-maju-di-pilkada-dki-jakarta>

Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer, 3(01), 1-9.

Aulia, N. (2024). Kaderisasi Anggota Perempuan Partai Politik di Tingkat Lokal: Studi Kasus Kaderisasi Perempuan DPC PDI Perjuangan Kota Semarang 2019-2024 (Bachelor's thesis, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo)

Fachrie, A. (2023). Rekrutmen kader partai politik: Studi tentang pola rekrutmen anggota DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Tangerang Selatan periode 2019-2024 (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Fatimah, D. N. Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat (Studi atas Sekolah Politik Kerakyatan dalam Kaderisasi Partai Amanat Nasional (PAN) Tahun 2015-2017) (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah).

Femelia, Y. (2017). Pola Pengkaderan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dalam Meningkatkan Kualitas Berpolitik: Study pada DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bandar Lampung. Skripsi, Universitas Negeri Raden Intan Lampung.

Panantang, G. V. (2014). Model Rekrutmen Dan Kaderisasi Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan DPC PDIP Kota Kediri.
Malang: Universitas Negeri Malang.

Hamson, Z. (2021). Politik Uang di Pemilu Indonesia: Sebuah Tinjauan. *Journal of Communication Sciences (JCoS)*, 4(1).

Hasibuan, S., & Ma'riyah, C. (2022). Institusionalisasi Pendidikan Politik PDI Perjuangan dalam Sekolah Partai bagi Calon Kepala Daerah 2020. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(1), 20-46.

Hidayaturrehman, M., & Ubaid, A. H. (2021). Kutukan Demokrasi, 11-25.

Istikharah, I., & Asrinaldi, A. (2019). Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Sebagai Penyelenggara Pemilu Tingkat Ad Hoc. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(2), 314-328.

Kartini Kartono. (1996). Pendidikan politik sebagai bagian dari pendidikan orang dewasa / Kartini Kartono. Bandung : Mandar Maju.

Mubarak, A. A., & Firdaus, S. U. (2020). PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PENGURUS PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KOTA SURAKARTA. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 4(3), 345-356.

Muhamad, H. (2018). PERAN PENDIDIKAN POLITIK KADER PARTAI DALAM MEMBENTUK KARAKTER BERTANGGUNG JAWAB: Studi Kasus pada DPD Partai Gerindra Jawa Barat (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).

Nurdiaman, M., Hasyim, S. B., Purnawan, R. A., & Kalamullah, K. (2019). Analisis Proses Kaderisasi Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Garut. *Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora*, 2(2), 27-32.

Silaban, R. S., & Ivanna, J. (2024). STRATEGI SEKOLAH PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA DALAM MEMENANGKAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024 DI KOTA MEDAN. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(2), 37-47.

Syaefullah, M. (2021). Analisis proses kaderisasi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan [PDF]. *JISORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Universitas Garut.

Wellyana, W., & Yudha, R. K. (2022). Sekolah Kader Oleh DPC PDI Perjuangan Bantul. *JUPANK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 105-115.

Wijayanti, S. N., & Iswandi, K. (2021). Peran Organisasi Sayap Partai Politik dalam Kaderisasi Partai Politik di Indonesia. *Sasi*, 27(4), 475-491.

Zainur, R. A. (n.d.). Peran Kaderisasi Partai Politik Dalam Pengajuan Calon Legislatif Dan Kepala Daerah. *Prosiding Seminar Hukum Aktual: Dinamika dan Tantangan Pemilu 2024*. Universitas Islam Indonesia.